

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG

2023



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN PINRANG**

2023



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023

ISSN : 2797-2763
Nomor Publikasi : 73150.2323
Katalog : 4102004.7315
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : vi + 108 halaman
Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Tim Penyusun Naskah

Penanggung Jawab : Joko Siswanto, SST
Koordinator : Sunarti, S.Si.
Penulis naskah : Nurfadhilah Muin, SST
Pembuat Infografis : Nurfadhilah Muin, SST
Desain Cover : Nurfadhilah Muin, SST
Pembuat Layout : Nurfadhilah Muin, SST

Penyunting : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Gambar Kover : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Penerbit : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
Pencetak : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
Sumber Ilustrasi : www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Pinrang tahun 2023 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang yang memuat berbagai indikator antara lain, indikator kependudukan, keluarga berencana (KB), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan indikator-indikator lainnya. Data yang digunakan bersumber dari BPS maupun organisasi pemerintah daerah. Data BPS yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Proyeksi Penduduk Indonesia, dan lainnya.

Publikasi ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen BPS akan data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Pinrang tahun 2023. Selain itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pembangunan daerah, khususnya di bidang sosial. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan. Terima kasih kepada pihak yang membantu terbitnya publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan.

Pinrang, Oktober 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pinrang

Joko Siswanto



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>



DAFTAR ISI

iii	Kata Pengantar	Taraf & Pola Konsumsi	59
v	Daftar Isi	Perumahan & Lingkungan	67
1	Pendahuluan	Kemiskinan	75
7	Kependudukan	Sosial Lainnya	85
19	Kesehatan & Gizi	Daftar Pustaka	93
31	Pendidikan	Lampiran RSE	97
45	Ketenagakerjaan		



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tahukah Kamu?

Indikator Kesejahteraan Rakyat merupakan indikator **SOSIAL EKONOMI** yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tingkat keberhasilan pembangunan

RUANG LINGKUP



SUMBER DATA

- SUSENAS
- PROYEKSI PENDUDUK
- SAKERNAS
- SENSUS PENDUDUK
- PROYEKSI INTERIM PENDUDUK



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>



Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan mempunyai makna yang luas, tidak hanya terkait dengan terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan tetapi juga menyangkut pemenuhan aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup bahkan rasa aman. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Diperlukan indikator-indikator lain seperti banyaknya penduduk yang bersekolah, tingkat kesehatan masyarakat, dan tingkat kemiskinan untuk mendapatkan gambaran kesejahteraan secara umum.

Ketersediaan data-data terkait sosial dan ekonomi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembangunan telah dicapai pemerintah suatu daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan statistik dasar. Statistik dasar adalah menyediakan data-data sosial maupun ekonomi melalui berbagai survei dan sensus. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dibukukan menjadi beragam publikasi, salah satunya Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra).

Publikasi indikator kesejahteraan rakyat menyajikan berbagai indikator dasar yang terkait dengan kependudukan, keluarga berencana (KB), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran konsumsi. Data-data yang ditampilkan merupakan hasil dari survei-survei BPS, diantaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022.

Publikasi ini diterbitkan sebagai upaya mengantisipasi berbagai kebutuhan data tentang kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang, yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data yang disajikan dalam publikasi ini dipilih sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan taraf hidup dan perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang.



1.1 Ruang Lingkup

Publikasi ini secara umum menjelaskan indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang tahun 2022. Namun demikian untuk beberapa indikator disajikan menurut kategori tertentu dan untuk mengetahui perkembangannya dilakukan perbandingan dengan menampilkan data pada beberapa tahun sebelumnya.

1.2 Sumber Data

Sumber data utama untuk penyusunan publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2022 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus tahun 2022. Diantara beberapa survei yang dilaksanakan oleh BPS, Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial, ekonomi, dan kependudukan yang paling luas. Indikator yang terkumpul dari hasil Susenas antara lain meliputi bidang pendidikan, partisipasi keluarga berencana (KB), kesehatan, perumahan, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Data Susenas dan Sakernas berpotensi menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dengan adanya ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial yang dapat diketahui dengan menyusun data berupa indikator tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, persentase peserta KB aktif, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih, dan juga rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk konsumsi makanan dan non makanan.

Sumber lain dalam penyusunan publikasi ini adalah hasil sensus penduduk 2020 serta proyeksi sensus penduduk untuk melihat perkembangan penduduk diantara dua sensus penduduk.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang 2023 disusun dalam sembilan bab. Bab satu sebagai pendahuluan yang mencakup ruang lingkup penulisan, sumber data, dan sistematika penulisan. Bab dua membahas tentang kependudukan, yaitu mengenai jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan



kepadatan penduduk, komposisi umur dan jenis kelamin, serta angka beban ketergantungan.

Pada bab ketiga akan dibahas mengenai kesehatan dan gizi, pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada, dan tempat tujuan berobat jalan. Selanjutnya pada bab empat dibahas mengenai kondisi pendidikan yang mencakup angka melek huruf, partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan juga rasio murid-guru serta rasio murid-sekolah.

Kemudian pada bab kelima menyajikan kondisi ketenagakerjaan yang mencakup partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, lama jam kerja, serta lapangan usaha utama bagi penduduk yang bekerja. Taraf dan pola konsumsi yang mencakup rata-rata pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan, rata-rata konsumsi energi dan protein akan dibahas pada bab enam.

Tingkat sosial yang berkaitan dengan kondisi perumahan dan penguasaan tempat tinggal disajikan dalam bab tujuh. Pokok bahasan yang ada pada bab tujuh antara lain mengenai kualitas rumah tempat tinggal, fasilitas perumahan, dan status kepemilikan rumah. Pada bab delapan akan disajikan mengenai kondisi ekonomi rumah tangga dengan cakupan pengeluaran konsumsi rumah tangga serta kondisi penduduk miskin. Dan bab terakhir yaitu bab sembilan akan membahas mengenai indikator sosial lainnya seperti penguasaan komputer dan telepon genggam, serta penggunaan internet.

Semua indikator tersebut akan diulas serta dilengkapi dengan tabel dan grafik sehingga memudahkan para konsumen data dalam memahami kondisi sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Pinrang.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>



2

KEPENDUDUKAN

PERSENTASE PENDUDUK PINRANG MENURUT KECAMATAN

Jumlah Penduduk Pinrang Tahun 2022

411.795 jiwa

BATULAPPA

2,80%

WATANG SAWITTO

13,90%

Distribusi Penduduk

0,01 - 3,00%

3,01 - 6,00%

6,01 - 9,00%

9,01 - 12,00%

12,01 - 15,00%



TAHUKAH KAMU?

Kecamatan PALETEANG adalah wilayah TERPADAT di Kabupaten Pinrang Tahun 2022

Rasio Jenis Kelamin

97,57 Persen



dari 100 penduduk perempuan terdapat 97 atau 98 penduduk laki-laki

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>



Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Artinya, penduduk merupakan pelaku dan penggerak pembangunan. Disisi lain, hasil dari pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Karena hakikat dari pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk dilihat sebagai salah satu faktor strategis karena disadari posisi mereka bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan.

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Namun di sisi lain, penduduk juga merupakan beban untuk mencapai pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baik sosial maupun ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menuntut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi pangan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga berpotensi menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk di suatu wilayah mempengaruhi taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang besar sementara pendapatan regional di wilayah tersebut relatif kecil akan mengakibatkan pendapatan perkapita wilayah tersebut rendah.

Permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta kesejahteraan masyarakat yang rendah akan mendorong munculnya permasalahan-permasalahan sosial. Ketimpangan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan dan kemiskinan merupakan beberapa faktor yang dapat memicu tindak kriminalitas.

Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum,

perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran, dan rekrutmen pekerja/ karyawan. Di lain pihak, bagi lembaga swasta nonprofit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu. Aspek kependudukan yang disajikan dalam bab ini meliputi jumlah dan pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta status perkawinan penduduk.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Sejak abad ke tujuh belas, hubungan manusia dengan pembangunan selalu menjadi perdebatan. Sekelompok pakar berpendapat bahwa penduduk mendukung pembangunan. Ada juga kelompok pakar yang justru berpendapat bahwa penduduk menghambat pembangunan. Sebagian yang lain menyatakan bahwa penduduk tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan.

Pada kenyataannya, jumlah dan pertumbuhan penduduk akan sangat berpengaruh pada proses pembangunan. Kondisi kependudukan Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten Pinrang pada khususnya yang masih dalam jumlah besar dan pertumbuhan yang tinggi secara tidak langsung berpengaruh pada pembangunan. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, berarti pemerintah juga harus terus menambah jumlah fasilitas hidup layak bagi masyarakatnya. Dua fasilitas yang paling mendasar adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan. Karena dua hal tersebut akan menentukan kualitas manusia seutuhnya.

Dengan mengetahui rasio jenis kelamin, akan dapat diidentifikasi komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Informasi ini digunakan untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Dahulu, karena adat dan kebiasaan, pendidikan laki-laki lebih diutamakan daripada pendidikan perempuan. Oleh karena itu, di masa sekarang, pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui jumlah laki-laki

dan perempuan di kelompok umur yang sama. Selain itu, informasi mengenai rasio jenis kelamin juga penting diketahui dalam dunia politik terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim, terdapat 411.795 jiwa yang mendiami 1.961,77 km² Kabupaten Pinrang pada Tahun 2022. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih rendah dibandingkan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 203.367 jiwa dan perempuan sebanyak 208.428 jiwa. Sehingga rasio jenis kelamin Kabupaten Pinrang sebesar 97,57. Angka ini diartikan bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 97 sampai 98 penduduk laki-laki.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Pinrang 2017-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	372.230	0,71	94,23
2018	374.583	0,63	94,31
2019	377.119	0,68	94,40
2020*	403.994	5,66	97,53
2021**	407.371	0,84	97,55
2022**	411.795	1,08	97,57

Sumber : ** Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023 *SP2020, Proyeksi Penduduk Kabupaten Pinrang 2010 – 2019.

Dalam enam tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Pinrang meningkat sekitar 39 ribu jiwa dengan rasio jenis kelamin yang semakin besar. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Pinrang lambat laun semakin mengecil seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Namun masih tetap berada dibawah 100, artinya jumlah penduduk perempuan masih lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi di suatu daerah. Indikator ini sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah pada masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, dapat diketahui pula kebutuhan dasar penduduk di wilayah tersebut di berbagai bidang. Akan tetapi, prediksi jumlah penduduk masih harus dilengkapi dengan berbagai macam karakteristik penduduknya agar dapat dipergunakan secara tepat sasaran.

Pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali akan menimbulkan berbagai masalah baik pengangguran, kemiskinan, tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kejahatan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Hal ini bisa saja memberikan dampak negatif pada upaya peningkatan kualitas SDM. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penduduk yang besar juga merupakan modal dan aset pembangunan.

Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akan membawa dampak terhadap pembangunan, termasuk dalam penentuan kebijakan kependudukan. Dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi, penentuan kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal. Seperti misalnya, penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan bidang kependudukan tersebut.

Selama tahun 2011-2021, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Pinrang per tahun sebesar 0,83 persen. Artinya rata-rata jumlah penduduk tumbuh 0,83 persen setiap tahunnya selama periode tahun 2011 hingga 2021. Kemudian pada tahun 2021-2022, LPP per tahun sebesar 1,08 persen. LPP yang kecil atau kurang dari dua persen mengindikasikan adanya usaha dalam menjaga kualitas sumber daya manusia dengan menekan pertumbuhan penduduk.

Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Pinrang. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk berada di wilayah perkotaan. Hal ini dipicu oleh keinginan masyarakat untuk

mencari kehidupan yang lebih baik. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Pinrang. Persebaran penduduk terkonsentrasi di ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Watang Sawitto serta wilayah sekitarnya, seperti Kecamatan Paleteang.



Grafik 1. Sebaran Penduduk Kabupaten Pinrang menurut Kecamatan, 2022 (Persen)

Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Pinrang diperkirakan berjumlah 411.795 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Lembang dengan luas wilayah 37,37 persen dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang dengan jumlah penduduk adalah 11,76 persen dari total penduduk Kabupaten Pinrang. Sedangkan untuk kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Paleteang dengan luas wilayah 1,90 persen dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang. Namun demikian jumlah penduduk di Kecamatan Paleteang mencapai 10,57 persen dari total penduduk Kabupaten Pinrang, menempati posisi ke empat dari sebaran penduduk terbanyak di Kabupaten Pinrang. Selain itu, mayoritas penduduk Pinrang tinggal di Kecamatan Watang Sawitto sebagai ibukota kabupaten yang mencapai 13,90 persen dari total penduduk Pinrang. Sedangkan hanya 2,80 persen saja dari total penduduk yang mendiami Kecamatan Batulappa.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang juga mengalami peningkatan. Tahun 2022, rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang adalah 210 jiwa per

km². Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 210 jiwa di tiap km luas wilayah Kabupaten Pinrang. Angka ini naik 2 jiwa per km² dibandingkan kepadatan penduduk pada tahun 2021 yang hanya mencapai 208 jiwa per km².

Tabel 2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Pinrang menurut Kecamatan Tahun 2021-2022

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	2021		2022	
		Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)	Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suppa	74,2	34.656	467	34.965	471
Mattiro Sompe	96,99	30.270	312	30.461	314
Lanrisang	73,01	19.877	272	20.092	275
Mattiro Bulu	132,49	31.848	240	32.255	243
Watang Sawitto	58,97	56.827	964	57.227	970
Paleteang	37,29	43.024	1.154	43.528	1.167
Tiroang	77,73	23.547	303	23.744	305
Patampanua	136,85	38.018	278	38.559	282
Cempa	90,3	19.679	218	19.866	220
Duampanua	291,86	50.618	173	51.139	175
Batulappa	158,99	11.392	72	11.532	73
Lembang	733,09	47.615	65	48.427	66
Pinrang	1.961,77	407.371	208	411.795	210

Sumber : Kabupaten Pinrang dalam Angka, 2022-2023

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Kecamatan Lembang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 66 jiwa per km². Meskipun merupakan kecamatan yang terluas dan memiliki potensi perkebunan, namun secara geografis Kecamatan Lembang terdiri atas daerah pegunungan dengan infrastruktur yang belum memadai, sehingga banyak penduduk yang

memilih menetap di daerah lain dibandingkan Kecamatan Lembang. Kondisi berbeda dengan Kecamatan Paleteang yang menjadi kecamatan terpadat di Kabupaten Pinrang. Kepadatan penduduk di Kecamatan Paleteang mencapai 1.167 jiwa per km², hampir delapan belas kali lebih padat dibandingkan Kecamatan Lembang bahkan lebih padat jika dibandingkan Kecamatan Watang Sawitto, ibukota Kabupaten Pinrang. Akses penduduk yang mudah ke ibukota disertai infrastruktur yang cukup memadai menjadi daya tarik penduduk Pinrang untuk menetap di Kecamatan Paleteang.

Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi/rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan angka beban tanggungan.

Angka Beban Ketergantungan (ABT) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah.

Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan usia tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan usia tidak produktif lagi. Oleh karena itu, ABT dapat dijadikan indikator kasar kondisi ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2022, penduduk Kabupaten Pinrang yang berusia 0-14 tahun pada tahun 2022 sebanyak 24,45 persen atau sebanyak 100.695 Jiwa. Sedangkan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas mencapai 7,17 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Pinrang. Dengan kata lain, terdapat 31,62 persen penduduk yang



tidak produktif di Kabupaten Pinrang. Hampir sepertiga penduduk Pinrang merupakan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021, kondisi pada tahun 2022 cukup menggembirakan. Jumlah penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi pada tahun 2021 mencapai 31,83 persen.

ABT Kabupaten Pinrang tahun 2022 sebesar 46,25 persen menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 46 sampai 47 penduduk usia tidak produktif. Nilai ABT Kabupaten Pinrang masih termasuk dalam kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan ABT Kabupaten Pinrang pada tahun 2021, maka ABT pada tahun ini menurun sebesar 0,46 poin persen. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu peningkatan proporsi penduduk usia produktif dan penurunan proporsi penduduk usia non produktif (kelompok 0-14 Tahun) pada tahun 2022. Penurunan ABT tentunya menjadi pertanda yang baik bagi pemerintah karena menunjukkan penurunan beban ekonomi. Artinya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi semakin rendah.

Tabel 3. Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2022

Kelompok Umur	2021			2022		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	12,78	12,11	24,88	12,55	11,90	24,45
15-64	33,63	34,53	68,16	33,77	34,60	68,38
65+	2,97	3,98	6,95	3,07	4,11	7,17
ABT Muda	37,98	35,06	36,51	37,16	34,40	35,76
ABT Tua	8,83	11,54	10,20	9,08	11,87	10,49
ABT	46,81	46,60	46,71	46,23	46,27	46,25

Sumber : Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (diolah) dan Sensus Penduduk 2020

Sementara itu, jika dilihat dari jenis kelaminnya, terlihat bahwa ABT perempuan lebih tinggi dibandingkan ABT laki-laki pada tahun 2022. Artinya beban yang ditanggung usia produktif perempuan lebih besar dibandingkan beban yang ditanggung oleh penduduk produktif laki-laki. Hal ini disebabkan karena penduduk laki-laki yang produktif lebih banyak dibandingkan perempuan, baik karena migrasi atau kematian sedangkan penduduk usia muda laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan.

Kondisi berbeda terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Nilai ABT (ABT Tua) untuk perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki baik tahun 2020 maupun 2021. Hal ini disebabkan oleh usia harapan hidup perempuan yang lebih panjang daripada laki-laki.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.lms.go.id>



3

KESEHATAN & GIZI

UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) PINRANG TAHUN 2022



70,15 tahun

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir



UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat



KELUHAN KESEHATAN PINRANG TAHUN 2022

14,46 %

14 DARI 100 Penduduk Pinrang mengalami KELUHAN kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari sebulan yang lalu (saat pencacahan)

15,60%

13,30%



Penduduk Perempuan di Pinrang Tahun 2022 lebih BANYAK yang SAKIT dibandingkan laki-laki



TAHUKAH KAMU?

97,77% baduta (0-23 bulan) pernah mendapatkan ASI dengan rata-rata pemberian ASI selama 11,6 bulan (Susenas, Maret 2022)

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>



Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat; menurunkan angka kematian ibu dan bayi; menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang; dan meningkatkan angka harapan hidup. Keberadaan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan adanya bidan di desa akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk hidup sehat. Selain itu, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain: angka harapan hidup; angka kesakitan; kesehatan ibu, prevalensi balita kurang gizi; dan indikator lainnya. Berbagai indikator lainnya tersebut

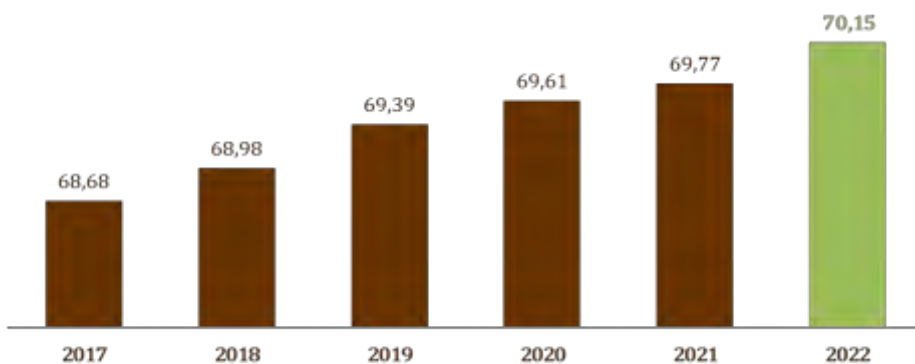


berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti: persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis; persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya; serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup (UHH), selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pinrang semakin meningkat, yang ditandai dengan peningkatan UHH, tercatat dari berumur 68,68 tahun pada tahun 2017 menjadi 70,15 tahun pada tahun 2022. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau *Life Expectancy (e_0)* didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Peningkatan UHH ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta.

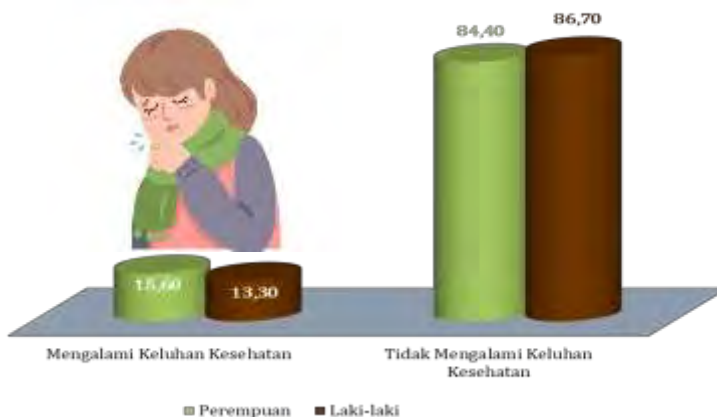


Grafik 2. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pinrang, 2017-2022 (Tahun)

Angka Kesakitan / Morbiditas

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), maka morbiditas (angka kesakitan) berarti adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll.

Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi serta penduduknya banyak yang mengalami sakit. Berdasarkan hasil Susenas Maret tahun 2022, penduduk yang mengeluh terhadap kesehatannya sebulan yang lalu (pada saat pendataan Susenas Maret 2022) sebesar 14,46 persen. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 8,42 persen. Jika berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih sensitif terhadap rasa sakit dibandingkan laki-laki. Persentase perempuan yang mengeluh sakit sekitar 15,60 persen pada tahun 2022, sementara laki-laki sekitar 13,30 persen. Artinya untuk setiap 100 penduduk, sekitar 15 hingga 16 orang perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan hanya 13 hingga 14 orang laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan.



Grafik 3. Persentase Penduduk Menurut Angka Kesakitan, 2022

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam akses fasilitas kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan.

Ketiadaan biaya pengobatan secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia tak terkecuali penduduk Kabupaten Pinrang, tujuannya mengatasi kendala biaya pengobatan. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Sampai saat ini, pelaksanaan JKN semakin direspon cukup positif oleh masyarakat. Dari data Susenas Maret 2022 menunjukkan penduduk Kabupaten Pinrang yang tidak menggunakan jaminan kesehatan pada tahun 2022 sebesar 57,59 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2021 dengan penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan mencapai 59,38 persen. Dengan kata lain, sekitar 42 dari 100 penduduk Pinrang menggunakan jaminan Kesehatan untuk berobat jalan. Jika berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak menggunakan jaminan kesehatan saat berobat jalan dibandingkan laki-laki. Jaminan kesehatan tersebut bisa berupa BPJS Non PBI, BPJS PBI, Askes, dan asuransi kesehatan lainnya

Tabel 4. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Karakteristik	Penggunaan Jaminan Kesehatan	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	36,53	63,47
Perempuan	46,60	53,60
Kabupaten Pinrang	42,41	57,59

Sumber: Susenas, 2022

Kesehatan Ibu dan Bayi

Seorang ibu, memegang kunci penting dalam kehadiran penerus-penerus yang sehat dan berkualitas. Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah senantiasa mengaktualisasikan dan mensosialisasikan peningkatan penggunaan ASI bagi balita.

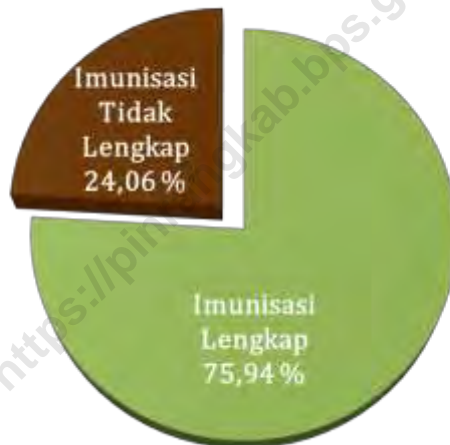
Pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan/minuman lain.



Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang, bayi yang berusia kurang dua tahun (0-23 bulan) yang pernah mendapatkan ASI sebesar 97,77 persen dengan rata-rata lama pemberian asi selama 11,6 bulan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Walaupun ada sebagian pihak yang masih belum sadar akan pentingnya imunisasi, tetapi imunisasi telah terbukti dapat meningkatkan kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu. Imunisasi merupakan program pencegahan, sebagai benteng untuk menangkal suatu jenis penyakit tertentu.



Grafik 4. Persentase Balita Menurut Imunisasi Lengkap 1-3-3-1-3, 2022

Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif yaitu kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, cakupan imunisasi dasar lengkap dengan kata lain, imunisasi wajib pada balita di Kabupaten Pinrang sudah mencapai 75,94 persen bayi. Artinya 7 dari 10 balita di Kabupaten Pinrang telah menerima imunisasi dasar lengkap.

Secara umum, pemberian imunisasi pada balita untuk semua jenis imunisasi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 cukup tinggi. Untuk pemberian imunisasi Hepatitis B misalnya. 97 dari 100 balita yang sudah menerima imunisasi jenis ini. Artinya hanya tersisa 3 dari 100 balita yang belum menerima imunisasi jenis ini. Namun, pemberian imunisasi jenis campak masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2022, hanya 8 dari 10 balita saja yang mendapatkan imunisasi campak.

Jika dilihat berdasarkan jenis imunisasi dan jenis kelamin, balita laki-laki lebih banyak mendapatkan jenis imunisasi Hepatitis B dan BCG dibandingkan balita perempuan sedangkan untuk jenis imunisasi DPT, polio, hepatitis B, dan campak lebih banyak diterima oleh balita perempuan dibandingkan laki-laki. Meskipun demikian, selisih pemberian imunisasi untuk balita laki-laki dan perempuan masih sangat kecil.

Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Karakteristik dan Jenis Imunisasi, 2022

Karakteristik	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/MMR	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	96,02	93,12	93,46	80,29	98,05
Perempuan	95,28	94,45	94,34	80,67	95,88
Kabupaten Pinrang	95,67	93,76	93,88	80,47	97,01

Sumber: Susenas Maret 2022

Dengan semakin banyaknya balita yang menerima imunisasi lengkap dan semakin meratanya pemberian imunisasi bagi balita laki-laki

dan perempuan diharapkan kekebalan tubuh balita akan penyakit di kemudian hari semakin meningkat.

Selain pemenuhan ASI bagi balita, program kecukupan gizi juga sangat penting bagi balita, karena kekurangan gizi pada balita akan mempengaruhi kecerdasan dan pertumbuhan anak. Status gizi secara tidak langsung bisa menggambarkan kualitas kehidupan. Kecukupan gizi tidak hanya tentang pemenuhan makanan, namun juga tentang kualitas dan kuantitas dari makanan itu sendiri haruslah tepat. Makanan tidak hanya perlu sehat dan beraneka ragam namun juga harus bersih dan sesuai dengan porsi. Tetapi yang perlu diingat juga adalah bahwa gizi berlebih pada balita juga dianggap tidak baik karena dapat memicu obesitas yang dapat menimbulkan resiko timbulnya penyakit. Jika anak mengalami hambat tumbuh, menyebabkan kondisi yang kita kenal dengan istilah stunting.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Penolong persalinan sangat berpengaruh terhadap keselamatan serta kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan dan kesehatan bayi serta ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan tentunya lebih baik dibanding tenaga non medis. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan barometer pelayanan kesehatan di suatu wilayah. AKI dan AKB erat kaitannya dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, Indonesia menerapkan program *safe motherhood* dengan pilar utamanya adalah persalinan aman yang ditolong oleh tenaga kesehatan.

Pada pengumpulan data Susenas, diperoleh informasi tentang penolong kelahiran pertama dan penolong kelahiran terakhir. Penolong kelahiran pertama adalah orang yang membantu proses persalinan pertama kali. Sedangkan penolong kelahiran terakhir adalah orang yang membantu proses persalinan hingga bayi dilahirkan. Penolong persalinan pertama dan terakhir dapat berbeda jika penolong kelahiran pertama menemukan masalah dalam persalinan yang tidak dapat ditangani sehingga

membutuhkan bantuan untuk penanganan lebih lanjut dalam menangani proses persalinan. Oleh sebab itu, pada umumnya penolong terakhir memiliki kemampuan dalam penanganan persalinan yang lebih baik dibandingkan penolong pertama.

Informasi mengenai penolong kelahiran diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan kesehatan telah menjangkau masyarakat. Standar pelayanan minimal kesehatan mensyaratkan 90 persen pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang signifikan, karena persentase wanita usia 15-49 tahun yang melahirkan selama dua tahun terakhir yang persalinan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 96,84 persen pada tahun 2018 menjadi 99,02 persen pada tahun 2022. Artinya, hanya 1 dari 100 kelahiran bayi yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan.

Tabel 6. Persentase Perempuan yang Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan selama 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Tempat Persalinan, 2022

Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan	Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
(1)	(2)	(3)
Kabupaten Pinrang	97,40	99,02

Sumber: Susenas, 2022

Perhatian pemerintah pada tenaga penolong persalinan sudah cukup baik karena apabila penolong persalinan bukanlah tenaga kesehatan maka akan memiliki resiko buruk terhadap tingginya tingkat kematian ibu dan anak yang biasanya dilakukan oleh tenaga yang belum terlatih seperti famili/keluarga yang bukan merupakan tenaga medis.

Ketersediaan akses dan sarana pelayanan dalam bentuk fasilitas persalinan, merupakan pelengkap penyelenggaraan kesehatan. Adanya



fasilitas kesehatan akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat. Perluasan akses fasilitas kesehatan diikuti dengan peningkatan penggunaan fasilitas kesehatan untuk menunjang persalinan di Kabupaten Pinrang. Penggunaan fasilitas kesehatan untuk melahirkan berdasarkan hasil Susenas Maret 2022 sebesar 97,40 persen. Artinya masyarakat lebih banyak memilih fasilitas kesehatan yang lebih aman dan nyaman untuk melahirkan dibandingkan tempat lain seperti di rumah.

<https://pinrangkab.bps.go.id>



4

PENDIDIKAN

94,82%

9 dari 10 Penduduk Pinrang Usia 15 Tahun Ke atas mampu MEMBACA dan MENULIS huruf Latin



TAHUKAH KAMU?

Rata-Rata Penduduk Pinrang yang berusia 25 Tahun Ke Atas telah menempuh pendidikan selama 8,04 tahun atau setara dengan tamat SMP Kelas 2

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2022



14,72%

Tidak Punya Ijazah SD



26,87%

SD/Sederajat



22,13%

SMP/Sederajat



36,28%

SMA Ke Atas

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>



Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan. Keterampilan dan kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan itu berfungsi mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Pada umumnya pendidikan yang tinggi akan memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang memiliki penghasilan lebih tinggi. Ijazah pendidikan yang tinggi sebenarnya tidak menentukan kesuksesan seseorang dikemudian hari, namun kegigihan pada apa yang dipelajari selama masa pendidikan itulah yang memberi bekal dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Maka disinilah letak peran penting pendidikan yang sesungguhnya.

Pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan kelas sosial. Sekolah menjadi saluran mobilitas masyarakat menuju status sosial yang lebih tinggi. Karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih, seseorang akan lebih dihargai di masyarakat sekaligus menunjukkan kemampuan secara ekonomi untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.

Pendidikan menjadi kunci utama bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Penyebab mendasar terjadinya keterbelakangan adalah kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah di suatu wilayah akan menghambat peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, politik dan kultural secara lebih efektif (Sen, 1999). Oleh sebab itu, pembangunan manusia dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Pendidikan juga menjadi salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's). Tercantum dalam tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan ke-4 ini dibentuk dengan harapan untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Pendidikan



berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.

Menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, maka dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk meraih tujuan ini ditempuh dengan membentuk berbagai macam program pendidikan, seperti wajib belajar sembilan tahun, program kejar paket A, paket B, paket C, dan sebagainya. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pada masa mendatang pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dapat terwujud.

Namun pada kenyataannya, masih jauh dari angan-angan dan harapan. Masih banyak permasalahan hadir di dunia pendidikan meskipun berbagai program pendidikan telah dijalankan. Kenaikan beberapa indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berjalan lambat. Pendidikan bukanlah barang instan dalam mencapainya. Melainkan proyek jangka panjang yang bahkan akan terus berlangsung selama negara ini berdiri. Sehingga konsistensi dalam melakukan perbaikan sangat diperlukan. Mulai dari kualitas pendidik, sistem pendidikan, kurikulum yang digunakan, siswa, birokrasi pendidikan, penggunaan anggaran, hingga segala hal yang terkait dengan proses mendidik. Karena tidak ada negara maju yang tidak memperhatikan pendidikannya.

Harapan Lama Sekolah (HLS) / *Expected Years of Schooling* (EYS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar sejak usia 7 tahun. Untuk mengakomodasi penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

HLS Kabupaten Pinrang tahun 2022 sebesar 13,25 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,25 tahun atau setara dengan Diploma I/II. HLS Kabupaten Pinrang tahun 2022 meningkat sebesar 0,01 poin dari tahun 2021 yaitu sebesar 13,24 tahun.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years of Schooling (MYS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini berguna untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi pencapaian dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lama sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP lama sekolah 9 tahun, tamat SMA lama sekolah 12 tahun, tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak.

Salah satu upaya pemerintah yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada RLS adalah meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi. Terutama untuk jenjang pascasarjana yang memiliki peluang besar untuk penduduk usia di atas 25 tahun.

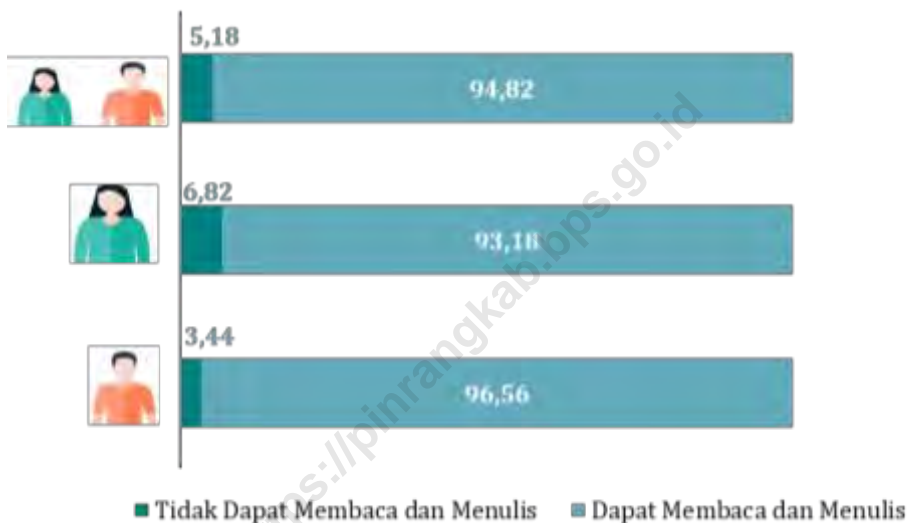
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pinrang tahun 2022 mencapai 8,04 tahun artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Pinrang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,04 tahun atau setara dengan tamat SMP kelas 2.

Angka Melek Huruf (AMH)

Tujuan nasional pendidikan adalah memberantas buta huruf. Indikator keberhasilannya adalah menurunnya angka buta huruf atau dengan kata lain meningkatnya angka melek huruf. Definisi melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin maupun huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulis.



Indikator Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis merupakan indikator dasar untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu wilayah karena membaca dan menulis merupakan dasar utama untuk memperluas pengetahuan. AMH juga menjadi tolak ukur keberhasilan program pengentasan buta huruf yang digalakkan pemerintah, baik pusat maupun daerah.



Grafik 5. Angka Melek Huruf (AMH) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2022

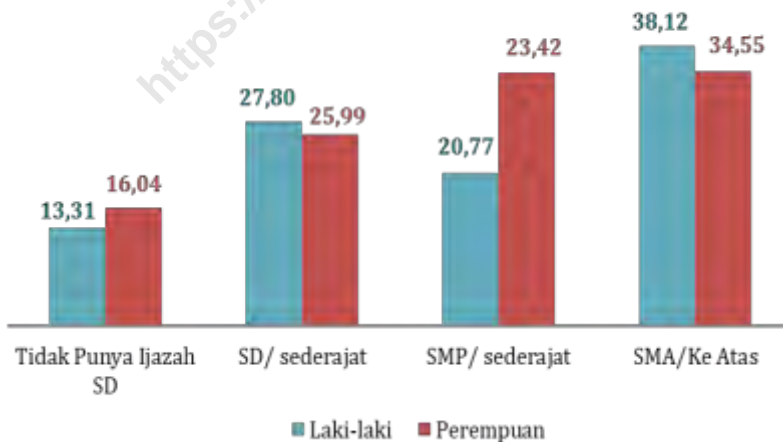
Secara umum AMH Kabupaten Pinrang tahun 2022 (94,82 persen) sedikit meningkat dibandingkan tahun 2021 (92,93 persen) sebesar 1,89 poin persen. Hal ini menunjukkan pengentasan buta huruf mesti terus ditingkatkan karena masih tersisa 5 hingga 6 orang dari 100 penduduk usia 15 tahun belum bisa membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Sementara itu, berdasarkan jenis kelaminnya, AMH laki-laki (96,56 persen) lebih besar daripada perempuan (93,18 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi laki-laki yang melek huruf lebih tinggi dibandingkan proporsi perempuan melek huruf.

Tingkat Pendidikan

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin bagus kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung berpengaruh pada mata rantai tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, keterampilan/keahlian semakin meningkat dan akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Hal ini disinyalir dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya penghasilan tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Peningkatan pendidikan haruslah dipandang sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan. Pemerintah perlu memikirkan strategi khusus bidang pendidikan agar lebih baik. Kebijakan dan memberi bekal dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Maka disinilah letak peran penting pendidikan yang sesungguhnya.



Grafik 6. Persentase Ijazah yang Dimiliki Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2022

Persentase laki-laki yang bersekolah lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah SD untuk perempuan 16,04 persen sedangkan laki-laki 13,31 persen. Selain itu, laki-laki yang memiliki ijazah tertinggi SMA ke atas juga lebih besar dari perempuan karena laki-laki memiliki orientasi untuk cepat bekerja setelah lulus sekolah menengah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Indikator tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dalam publikasi ini indikator tingkat partisipasi sekolah diukur menggunakan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk yang bersekolah pada setiap kelompok usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai, tanpa melihat jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh. Sejak tahun 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan

perannya dalam menentukan APS. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	100,00	99,27	99,63
13-15	83,93	99,73	90,63
16-18	78,96	67,67	73,59

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang tahun 2022

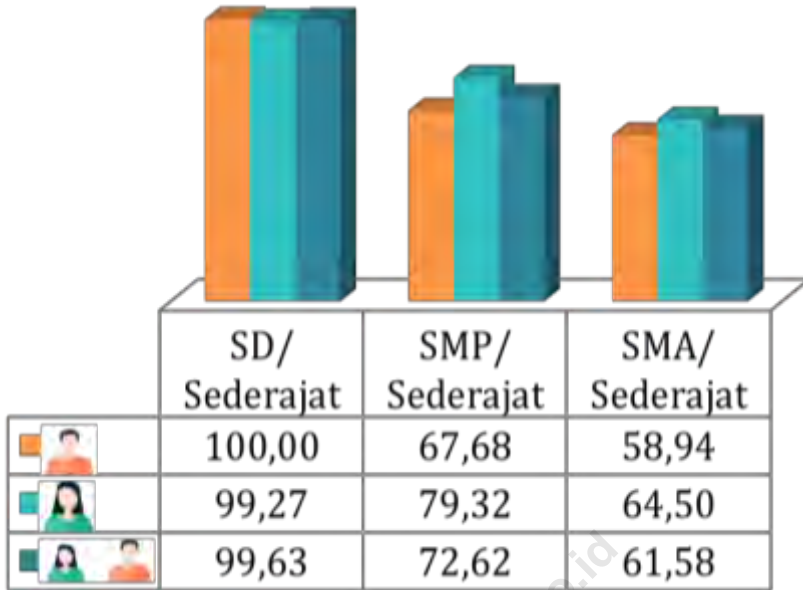
APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,63 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Pinrang sedang mengikuti pendidikan, sementara pada kelompok umur 13-15 tahun mencapai 90,63 persen yang sedang mengikuti pendidikan. Lain halnya pada kelompok umur 16-18 tahun, APS hanya mencapai 73,59 persen saja. Kondisi serupa terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Rendahnya APS pada kelompok umur 16-18 tahun menunjukkan adanya pertimbangan masyarakat untuk bersekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjadi pertimbangan tersebut, diantaranya biaya, akses, prioritas, budaya, dan faktor lain. Menariknya APS pada kelompok umur 7-12 tahun untuk laki-laki pada tahun 2022 sudah mencapai 100 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator selain APS yang dapat dikatakan lebih halus dalam perhitungannya. Jika APS tidak memperhitungkan jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh oleh anak usia sekolah, APM ini hanya memasukkan anak yang sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya. APM SD untuk anak usia 7-12 tahun yang sedang sekolah di jenjang SD, APM SMP untuk anak usia 13-15 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMP, dan APM SMA/ SMK untuk usia 16-18 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMA/SMK. Sehingga APM akan lebih rendah daripada APS.

Menurut definisi, Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah pada jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dari perhitungan APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang ditempuh.

Jika melihat APM di Kabupaten Pinrang tahun 2022, APM terus menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan dengan terendah terdapat pada jenjang SMA baik untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. APM laki-laki untuk jenjang SMA memiliki nilai terendah yaitu 58,94 persen. Artinya, hanya 58 orang penduduk laki-laki usia SMA yang bersekolah sesuai usianya. Sementara APM tertinggi terdapat pada jenjang SD untuk laki-laki yaitu sebesar 100 persen. Artinya semua penduduk laki-laki yang bersekolah pada jenjang SD sudah sesuai dengan usianya.



Grafik 7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2022

Rasio Siswa, Guru, dan Sekolah

Rasio siswa dengan guru adalah jumlah siswa dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio siswa dengan guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio siswa dengan guru digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah siswa yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio siswa dengan guru berarti semakin besar beban guru dalam mengawasi siswa sehingga akan semakin besar siswa yang kurang perhatian dari gurunya. Semakin banyak siswa yang menjadi tanggungan guru akan mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam pengajaran. Sebaliknya, semakin kecil rasio siswa dengan guru memungkinkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pengajaran. Siswa lebih banyak mendapat perhatian dari guru, begitu juga guru menjadi lebih ringan bebannya dalam melakukan pengawasan dan pengajaran kepada siswa.

Tabel 8. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah			Jumlah Guru	Jumlah Murid
	Negeri	Swasta	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	315	10	325	2.888	40.647
MI	1	28	29	336	3.348
SMP	52	6	58	1.287	17.769
MTS	1	25	26	514	3.929
SMA	11	4	15	531	7.523
MA	1	8	9	176	1.917
SMK	10	6	16	694	7.735
SLB	1	0	1	15	49
Total	392	87	479	6.441	82.917

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>, data semester ganjil

2021/2022), Kementerian Agama (<http://emispendis.kemenag.go.id/>, data semester ganjil 2021/2022)

Di Kabupaten Pinrang, rasio siswa dengan guru untuk jenjang SD sebesar 14,07; MI sebesar 9,96; SMP sebesar 13,81; MTS sebesar 7,64; SMA sebesar 14,17; MA sebesar 10,89; SMK sebesar 11,15; dan SLB sebesar 3,27 pada tahun 2022. Artinya pada jenjang SD satu orang guru memiliki tanggungan mendidik siswa sebanyak 12 orang siswa. Begitu juga untuk jenjang selanjutnya. Untuk jenjang SLB, rasio siswa dengan guru merupakan yang terkecil dikarenakan siswa lebih membutuhkan banyak bantuan dari guru dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Satu orang guru SLB memiliki tanggungan mendidik siswa SLB sebanyak 3 siswa.

Rasio guru dengan sekolah pada setiap jenjang pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah guru dengan sekolah. Rasio ini berguna

untuk mengetahui berapa rata-rata jumlah guru pada setiap sekolah pada suatu daerah tertentu. Di Kabupaten Pinrang rasio guru dengan sekolah untuk jenjang SD rata-rata memiliki 8-9 orang guru sedangkan untuk MI rata-rata memiliki 11-12 orang guru. Pada jenjang SMP memiliki 22-23 guru, MTs memiliki 19-20 guru, SMA memiliki 35-36 guru, MA memiliki 19-20 orang guru, SMK memiliki 43-44 guru, dan SLB memiliki 15 guru. Rasio guru dengan sekolah terkecil adalah pada jenjang SD dan MI dan terbesar adalah pada jenjang SMK. Jenjang SMA dan SMK memiliki rasio yang tinggi dikarenakan mata pelajaran yang mulai terspesialisasi sehingga dibutuhkan guru yang sesuai dengan keahliannya.

Secara umum rasio siswa dengan guru tidak berbeda jauh untuk setiap jenjang terkecuali SLB. Rasio guru dengan sekolah terlihat adanya jaminan bahwa proses belajar mengajar tetap bisa berjalan baik, setidaknya tidak terhambat oleh kekurangan guru. Namun perlu diingat apabila dilihat dari nilai APS dan APM masih terdapat anak usia sekolah yang belum bersekolah sehingga perlunya dorongan dari berbagai pihak termasuk pemerintah untuk meminimalkan anak tidak sekolah. Peningkatan kompetensi guru juga harus diperhatikan mengingat zaman yang berkembang semakin cepat dan juga demi terjaminnya masa depan siswa.



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>



5

KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

5 hingga 6 dari 10 penduduk usia kerja merupakan ANGKATAN KERJA



57,72%

39,79%

TAHUKAH KAMU?

Pada tahun 2022, sebanyak 39,79 persen dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten Pinrang bekerja di bidang PERTANIAN



Pekerja Perempuan

10,76%

10 hingga 11 dari 100 orang pekerja perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran muncul sebagai akibat kesenjangan antara SDM dengan SDA dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk sedangkan lapangan kerja yang tersedia terbatas, akibatnya pengangguran semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi melainkan juga di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu batu ujian yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian.

Untuk mengatasi persoalan pengangguran, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja sesuai pertumbuhan angkatan kerja dengan mendorong pertumbuhan industri yang banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas SDM agar memenuhi kebutuhan industri, serta mendorong masyarakat memiliki jiwa *entrepreneurship* sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.



Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang yang termasuk dalam usia kerja pada bulan Agustus 2022 sebanyak 288.914 orang. Dari jumlah tersebut, yang tergolong dalam angkatan kerja sejumlah 166.763 orang yang terdiri dari 162.105 orang penduduk yang bekerja atau sebanyak 97,21 persen sudah bekerja dan 4.658 orang penduduk yang menganggur. Jumlah orang yang bekerja pada tahun 2022 meningkat sebesar 2,14 persen dari tahun 2021, sementara itu jumlah orang yang menganggur menurun sebesar 30,64 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 9. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Pinrang, 2020-2022

Kegiatan Utama	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (orang)	283.694	286.334	288.914
Angkatan Kerja (orang)	167.701	165.431	166.763
Bekerja (orang)	160.681	158.714	162.105
Menganggur (orang)	7.020	6.717	4.658
TPT (%)	4,19	4,06	2,79
TPAK (%)	59,11	57,78	57,72

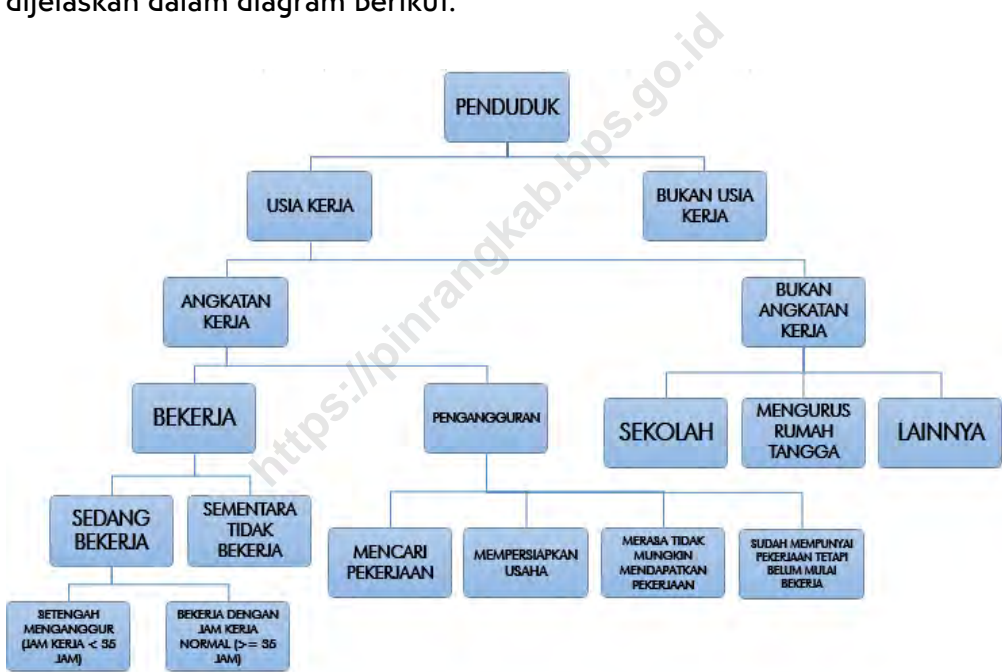
Sumber: Sakernas Agustus, 2020-2022

Konsep Ketenagakerjaan

Konsep dalam bidang ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS membagi penduduk menjadi dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran. Termasuk dalam kelompok bekerja adalah penduduk usia kerja yang statusnya bekerja, dan sementara tidak bekerja (karena

menunggu panen, sedang cuti atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya).

Menurut jam kerjanya, penduduk bekerja dibedakan menjadi penduduk yang bekerja sesuai jam kerja normal yaitu minimal 35 jam per minggu dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, atau disebut setengah menganggur. Penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan suatu usaha. Termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah kelompok usia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya adalah bersekolah atau mengurus rumah tangga. Lebih jelasnya klasifikasi penduduk dalam konsep ketenagakerjaan dijelaskan dalam diagram berikut.



Grafik 8. Diagram Ketenagakerjaan, BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja

yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas). TPAK adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 10. TPAK Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2022

Klasifikasi		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	82,64	80,95	79,21
	Perempuan	37,47	36,44	37,92
Wilayah	Perkotaan	58,57	57,83	56,12
	Perdesaan	59,38	57,75	58,57
Pinrang		59,11	57,78	57,72

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan tahun 2020-2022

Penduduk usia kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 sebanyak 57,72 persen adalah angkatan kerja, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 42,28 persen bukan termasuk angkatan kerja. Dari keseluruhan bukan angkatan kerja, terdapat sebanyak 74,32 persennya adalah penduduk yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sementara yang bersekolah terdapat sebanyak 13,28 persen dan lainnya sebanyak 12,40 persen. Lainnya disini termasuk yang berada dalam usia kerja tetapi tidak dapat bekerja karena cacat dan lain sebagainya.

TPAK Kabupaten Pinrang tahun 2022 sebesar 57,72 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 57 sampai 58 orang yang termasuk angkatan kerja. Angka ini menurun 0,06 poin persen dibandingkan tahun 2021 (57,78 persen). Sementara itu, jika dilihat dari jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan selama tahun 2020 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki usia

15 tahun ke atas aktif secara ekonomi dengan bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sebaliknya, perempuan lebih banyak yang termasuk dalam bukan angkatan kerja karena menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPAK Kabupaten Pinrang tahun 2022 untuk daerah perdesaan (58,57 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan TPAK perkotaan (56,12 persen). Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2021, TPAK wilayah perdesaan lebih rendah dari wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang tinggal di daerah perdesaan lebih banyak aktif secara ekonomi dengan bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibandingkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tinggal di daerah perkotaan. TPAK untuk wilayah perdesaan meningkat sebesar 0,82 poin persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 57,75 persen pada tahun 2021 menjadi 58,57 persen pada tahun 2022.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dari seluruh penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2022, sebesar 42,28 persen termasuk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang berstatus sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Dari 57,72 persen angkatan kerja, sebesar 97,21 persen adalah penduduk yang bekerja sedangkan 2,79 persen merupakan pengangguran. Penduduk yang bekerja meliputi penduduk yang sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Sementara itu, penduduk yang menganggur meliputi pengangguran pernah bekerja dan pengangguran tidak pernah bekerja.

Berdasarkan Tabel 11, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang tahun 2022 sebesar 2,79 persen, yang berarti bahwa pada tahun 2022 dari 100 penduduk 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja di Kabupaten Pinrang, sebanyak 2 sampai 3 orang



merupakan pengangguran. Dengan kata lain, masih ada sekitar 2,79 persen angkatan kerja di Kabupaten Pinrang yang tidak terserap dipasar kerja. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,27 poin persen. Fenomena ini menyiratkan adanya sedikit peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022.

Tabel 11. TPT Kabupaten Pinrang Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	1,58	3,11	1,40
SMP	5,37	3,12	2,27
SMA	3,76	3,44	6,54
SMK	10,25	7,10	0,33
Diploma I/II/III/Akademi	0,00	6,07	2,84
Universitas	8,81	6,44	2,08
Jumlah	4,19	4,06	2,79

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan tahun 2020-2022, diolah

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Tetapi karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk yang berpendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Selain itu sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi pengangguran.

Pada tahun 2020, TPT tertinggi berada pada angkatan kerja lulusan SMK yaitu sebesar 10,25 persen. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2021 Namun pada tahun 2022, TPT tertinggi adalah lulusan SMA sebesar 6,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada angkatan kerja lulusan SMA/SMK belum terserap secara baik dipasar tenaga kerja karena dianggap belum “cukup” memiliki disiplin keilmuan sehingga kebanyakan lapangan pekerjaan lebih mensyaratkan lulusan pendidikan tinggi untuk pekerjaan profesional. Jika melihat dari sisi tenaga kerjanya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka mereka lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka dan tergolong bukan pekerjaan yang kasar. Hal ini terlihat tingginya angka TPT pada angkatan kerja lulusan universitas dan diploma yang mencapai 2,08 persen dan 2,84 persen pada tahun 2022. Berbeda halnya dengan lulusan SD kebawah. Justru TPT lulusan SD ke bawah selama periode 2020 hingga 2022 selalu lebih rendah bahkan pada tahun 2022, TPT lulusan SD Ke bawah hanya sebesar 1,40 persen. Hal ini dikarenakan angkatan kerja lulusan SD ke bawah tidak terlalu selektif memilih pekerjaan termasuk pekerjaan yang kasar.

Sementara dilain pihak, banyak usaha yang perlahan bangkit pada tahun 2022. Usaha yang diawal pandemi melakukan efisiensi dengan merumahkan beberapa karyawannya kini sudah mulai beroperasi seperti sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Selain itu, gencarnya pemerintah melakukan vaksinasi membuat aturan PPKM atau pembatasan aktivitas masyarakat sudah dilonggarkan. Pembatasan jam operasional sudah tidak berlaku lagi, sehingga beberapa aktivitas ekonomi seperti kedai makan/minum sudah memberlakukan jam operasional yang normal. Hal ini mendorong terjadinya penurunan tingkat pengangguran.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Konsep bekerja yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh BPS adalah bekerja minimal satu jam selama seminggu terakhir. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 adalah 162.105 jiwa. Jumlah tersebut



mengalami peningkatan sebesar 3.391 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 158.714 jiwa.

Tabel 12. Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha, Jenis Kelamin, dan Wilayah, 2022

Klasifikasi		Pertanian	Manufaktur	Jasa
(1)		(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	36,78	11,02	18,84
	Perempuan	3,01	5,13	25,22
Wilayah	Perkotaan	7,82	5,69	19,33
	Perdesaan	31,97	10,46	24,73
Pinrang		39,79	16,15	44,06

Sumber : Sakernas Agustus 2022

Distribusi penduduk yang bekerja menurut sektor utama yaitu pertanian, manufaktur, dan jasa. Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Pinrang yang bekerja di Sektor Pertanian sebesar 39,79 persen. Sebanyak 16,15 persen dari 162.105 penduduk yang bekerja menggeluti pekerjaan di Sektor Manufaktur, dan sisanya sebanyak 44,06 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sebanyak 71.422 orang bekerja di sektor Jasa.

Secara wilayah, mayoritas penduduk yang menempati wilayah perkotaan bekerja di sektor jasa yaitu sebesar 19,33 persen. Sektor jasa meliputi perdagangan, akomodasi, rumah makan/restoran, jasa angkutan, usaha sewa, dan lain sebagainya. Sementara mayoritas penduduk wilayah perdesaan bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 31,97 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja.

Apabila dilihat dari jenis kelamin, secara umum penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak daripada penduduk perempuan. Di sektor pertanian dan manufaktur, jumlah penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dari penduduk perempuan yaitu masing-masing sebesar 36,78 dan 11,02 persen dari 162.105 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Sedangkan penduduk perempuan yang bekerja di sektor pertanian dan

manufaktur masing-masing adalah sebesar 3,01 dan 5,13 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Menariknya penduduk perempuan lebih banyak menggeluti bidang pekerjaan di sektor jasa dibandingkan laki-laki yaitu 25,22 persen perempuan dan laki-laki sebesar 18,84 persen saja dari 162.105 penduduk yang bekerja.

Tabel 13. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Wilayah, dan Jenis Kelamin, 2022

Status Pekerjaan	Jenis Kelamin		Wilayah		Pinrang
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	18,55	8,43	8,40	18,58	26,98
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap	18,76	7,99	5,52	21,23	26,75
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar	4,36	0,33	1,93	2,76	4,68
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	17,88	10,76	13,29	15,35	28,64
Pekerja Bebas Pertanian	0,10	0,09	0,00	0,18	0,18
Pekerja Bebas Non Pertanian	0,86	0,00	0,85	0,01	0,86
Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	6,15	5,75	2,84	9,06	11,90

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 2022, diolah

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan, mayoritas penduduk Pinrang pada tahun 2022 bekerja sebagai berusaha baik berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha dibantu buruh tetap. Penduduk yang bekerja sebagai berusaha 58,42 persen. Artinya lebih dari separuh penduduk Pinrang bekerja dengan usaha sendiri.

Selanjutnya, status pekerjaan utama yang memiliki persentase terbesar kedua adalah penduduk bekerja yang berstatus buruh/karyawan mencapai 28,64 persen pada tahun 2022 atau sekitar 46.421 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan status sebagai pekerja bebas pertanian paling sedikit persentasenya yaitu sebesar 0,18 persen atau sekitar 298 orang.

Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, laki-laki di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 lebih banyak bekerja sebagai berusaha sendiri sedangkan Perempuan lebih banyak bekerja sebagai buruh/karyawan dibandingkan pekerjaan lain. Baik laki-laki maupun perempuan juga kurang meminati pekerjaan sebagai pekerja bebas baik di pertanian maupun di non pertanian. Sementara itu, penduduk wilayah perkotaan masih didominasi oleh pekerja sebagai buruh/karyawan sedangkan perdesaan didominasi oleh pengusaha dibantu buruh tidak tetap.

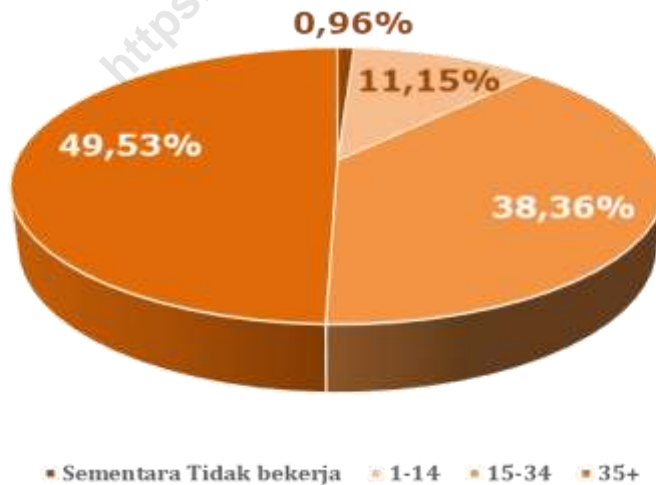
Jika dilihat dari sisi penciptaan lapangan usaha sendiri, cukup banyak pekerja yang mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, yang terdiri dari pengusaha yang berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap, dan dibantu buruh tetap, yaitu mencapai 58,42 persen atau menempati porsi terbesar dari seluruh pekerja. Besarnya persentase jumlah tenaga kerja dengan status pekerjaan utama adalah berusaha sendiri menunjukkan bahwa pekerja di Kabupaten Pinrang tidak hanya terpaku pada pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagian besar pekerja memiliki keinginan untuk memiliki usaha sendiri bahkan hingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Secara sederhana kegiatan formal dan informal diidentifikasi menurut status pekerjaan. Pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar. Selebihnya merupakan pekerja formal.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, pekerja informal di Kabupaten Pinrang mencapai 66,68 persen sedangkan sisanya sebesar 33,32 persen merupakan pekerja formal.

Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, dapat diperoleh indikator pengangguran terselubung atau setengah pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja mereka, misalnya menambah balai latihan kerja.



Grafik 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, 2022

Menurut jumlah jam kerja selama seminggu, diketahui bahwa separuh dari pekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 bekerja 35 jam atau lebih (49,53 persen). Berbeda halnya dengan pekerja yang bekerja selama 15 sampai 34 jam mencapai 38,36 persen saja dan sebanyak 11,15 persen pekerja yang bekerja selama 1 hingga 14 jam dalam seminggu. Sedangkan sisanya yaitu 0,96 persen sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. Dengan demikian tingkat pengangguran terselubung (terlihat bekerja akan tetapi jam kerjanya sangat kecil yaitu kurang dari 35 jam per minggu) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 adalah 49,51 persen. Tingkat pengangguran terselubung yang cukup tinggi, hampir separuh penduduk yang bekerja merupakan pengangguran terselubung. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya pekerja keluarga dan pekerja bebas.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

6

TARAF & POLA KONSUMSI

Rata-Rata Total Pengeluaran
Per kapita Sebulan

Rp. 967.714,-

Makanan

Rp. 497.842,-



Rp. 469.872,-
Bukan Makanan

TAHUKAH KAMU?

Pada tahun 2022, sebanyak 15 persen dari total pengeluaran makanan digunakan untuk konsumsi rokok dan tembakau

Rp. 74.642,-

Rata-Rata Konsumsi Per kapita Selama Sehari

Konsumsi Energi

1.723,81 kkal

Konsumsi Protein

52,11 gram



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>



Taraf dan pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu dari sekian indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan dibanding non makanan, mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

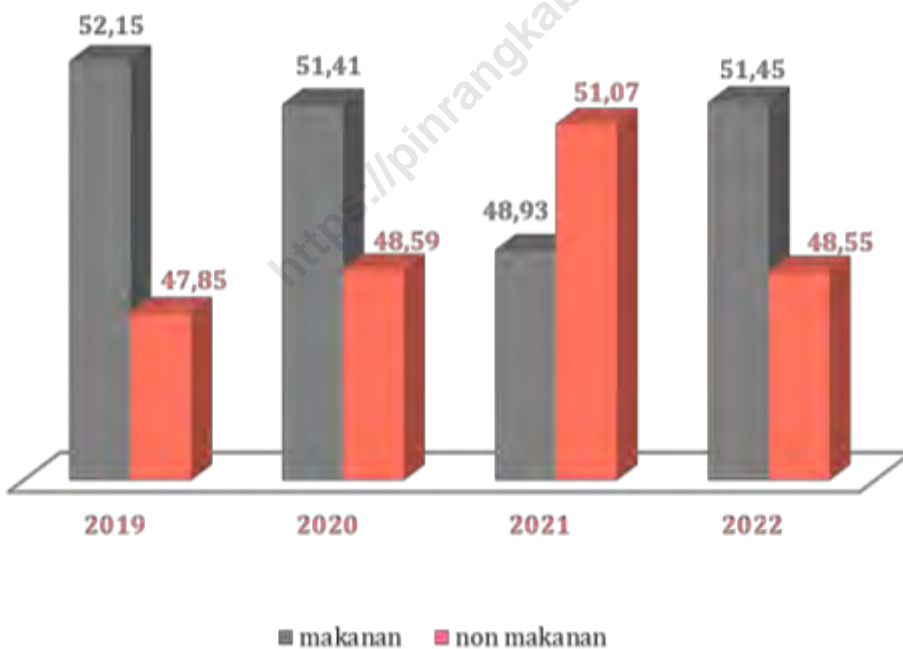
Pengeluaran Rumah Tangga

Jenis pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluarannya. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini terlihat pada kelompok penduduk dengan tingkat konsumsi makanannya yang mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau untuk ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, karena perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Persentase konsumsi makanan terhadap total pengeluaran selama periode 2019 hingga 2022 sedikit berfluktuasi. Pada periode 2019-2021, persentase konsumsi makanan penduduk Kabupaten Pinrang menunjukkan penurunan. Sebaliknya, untuk persentase konsumsi non makanan meningkat dari tahun 2019 hingga 2021. Kondisi periode 2019-2021 ini



menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi dari komoditi makanan ke non makanan. Ini menunjukkan bahwa persentase konsumsi non makanan yang relatif makin besar merupakan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan terjadi pergeseran porsi pengeluaran masyarakat yang sebelumnya untuk konsumsi makanan sekarang lambat laun beralih untuk konsumsi non makanan. Bahkan pada tahun 2021, persentase konsumsi non makanan masyarakat Pinrang sudah diatas 50 persen. Artinya lebih dari separuh pengeluaran masyarakat Pinrang dibelanjakan untuk konsumsi non makanan seperti pembelian barang dan jasa. Namun kondisi ini tidak bertahan lama, pada tahun 2022 porsi pengeluaran terhadap makanan kembali meningkat hingga mencapai 51,45 persen sedangkan pengeluaran untuk konsumsi non makanan menurun menjadi 48,55 persen. Hal ini menandakan penduduk Pinrang masih lebih memilih mengalokasikan pengeluaran untuk konsumsi makanan dibandingkan konsumsi non makanan.



Grafik 10. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Dalam Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2022

Pada tahun 2022, rata-rata konsumsi perkapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Pinrang adalah Rp 967.714,-. Angka ini lebih kecil 2,84 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu Rp 996.006,-. Jika dihitung berdasarkan jenis konsumsinya, maka rata-rata konsumsi makanan perkapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 adalah sebesar 51,45 persen dari total pengeluaran atau setara dengan Rp 497.842,-, meningkat 2,52 poin persen dibandingkan tahun 2021. Sebaliknya, persentase pengeluaran non makanan menunjukkan penurunan dari 51,07 persen pada tahun 2021 menjadi 48,55 persen pada tahun 2022 atau sekitar Rp 469.872,- dari total pengeluaran rumah tangga.

Tabel 14. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (rupiah) Menurut Kelompok Barang, Maret 2022

Kelompok Barang		Rata-Rata Pengeluaran Sebulan (Rp)
(1)		(2)
A.	MAKANAN	
1	Padi-Padian	62.127
2	Umbi-Umbian	2.141
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	64.897
4	Daging	8.521
5	Telur dan Susu	17.923
6	Sayur-Sayuran	24.097
7	Kacang-Kacangan	5.562
8	Buah-Buahan	18.291
9	Minyak dan Kelapa	13.518
10	Bahan Minuman	12.583
11	Bumbu-Bumbuan	8.948
12	Konsumsi Lainnya	9.051
13	Makanan dan Minuman Jadi	175.530



Kelompok Barang		Rata-Rata Pengeluaran Sebulan (Rp)
(1)		(2)
14	Rokok dan tembakau	74.652
Jumlah Makanan		497.842
B.	BUKAN MAKANAN	
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	232.907
2	Aneka Barang dan Jasa	89.232
3	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	31.309
4	Barang Tahan Lama	57.386
5	Pajak Pungutan, dan Asuransi	46.907
6	Keperluan Pesta dan Upacara	12.131
Jumlah Bukan Makanan		469.872
Jumlah		967.714

Sumber : Susenas Maret, 2022

Jika dilihat dari kelompok barang, pengeluaran terbanyak untuk konsumsi makanan adalah makanan dan minuman jadi. Porsi pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi sebesar Rp 175.530,- atau sebesar 35,26 persen dari total pengeluaran kelompok makanan. Menariknya pengeluaran untuk konsumsi rokok dan tembakau lebih besar dibandingkan pengeluaran padi-padian dan ikan/udang/cumi/kerang. Pengeluaran untuk rokok dan tembakau mencapai Rp 74.652,- atau setara dengan 15,00 persen dari total pengeluaran makanan. Sedangkan pengeluaran untuk padi-padian sebesar 12,48 persen dan konsumsi ikan/udang/cumi/kerang sebanyak 13,04 persen dari total pengeluaran makanan, Umbi-umbian menjadi kelompok makanan dengan pengeluaran terendah sebesar Rp. 2.141,- selama sebulan. Tingginya pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi dibandingkan bahan makanan yang lainnya salah satunya dipengaruhi oleh semakin maraknya kedai

makan/minum dan semakin mudahnya masyarakat memperoleh makanan dan minuman jadi melalui pemesanan via *online* menggunakan jasa kurir.

Dari sisi kelompok non makanan, pengeluaran penduduk Pinrang paling besar diperuntukkan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga dibandingkan kelompok non makanan lainnya yaitu sebesar 49,57 persen dari total pengeluaran non makanan. Artinya hampir separuh pengeluaran non makanan diperuntukkan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Berbeda halnya pengeluaran untuk barang tahan lama yang hanya 19,00 persen saja dari total pengeluaran non makanan. Keperluan pesta dan upacara menjadi kelompok non makanan dengan pengeluaran terendah sebesar Rp 12.131,- selama sebulan. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pesta dan upacara tidak setiap saat dilaksanakan.

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah kalori dan protein yang dikonsumsi dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Pada tahun 2022 (periode Maret) rata-rata konsumsi energi perhari penduduk Kabupaten Pinrang sebesar 1.723,81 kkal dan rata-rata kecukupan konsumsi protein penduduk Kabupaten Pinrang adalah 52,11 gram. Kabupaten Pinrang dalam konsumsi energi dan protein belum mencapai standar rata-rata kecukupan energi yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu perlunya kesadaran masyarakat terkait pentingnya asupan nutrisi setiap makanan yang disantap.



Tabel 15. Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Sehari Menurut Komoditi Makanan, Maret 2022

Komoditi Makanan	Energi (kcal)	Protein (gram)
(1)	(2)	(3)
Padi-Padian	838,37	19,75
Umbi-Umbian	12,77	0,10
Ikan/udang/cumi/kerang	68,09	12,40
Daging	25,97	1,60
Telur Dan Susu	35,48	2,02
Sayur-Sayuran	20,80	1,50
Kacang-Kacangan	28,25	2,68
Buah-Buahan	33,41	0,39
Minyak Dan Kelapa	180,06	0,12
Bahan Minuman	58,19	0,50
Bumbu-Bumbuan	3,49	0,12
Bahan Makanan Lainnya	51,94	1,14
Makanan Minuman Jadi	367,00	9,80
Rokok Dan Tembakau	0,00	0,00
Total Makanan	1.723,81	52,11

Sumber: Susenas Maret 2022

7

PERUMAHAN & LINGKUNGAN

94,74%

Rumah tangga di Pinrang memiliki rumah dengan
**ATAP GENTENG,
SENG & BETON**



Rumah tangga menempati rumah
MILIK SENDIRI

90,39%

99,10%

Rumah tangga di Pinrang menempati rumah dengan
LANTAI BUKAN TANAH



75,98%

TAHUKAH KAMU?

Pada tahun 2022, sebanyak 75,98 PERSEN rumah tangga di Kabupaten Pinrang yang memiliki SUMBER AIR MINUM BERSIH



86,67%

Rumah Tangga memiliki fasilitas B A B yang digunakan SENDIRI

98,61%

Rumah Tangga menggunakan
KLOSET JENIS LEHER ANGSA

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan, dan kesehatan. Pentingnya rumah dapat dilihat dari fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat istirahat, tempat berlindung dari hujan dan panas serta tempat berlangsungnya proses sosialisasi bagi semua anggota rumah tangga. Keberadaan rumah dan fasilitasnya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan anggota rumah tangga sekaligus menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin baik rumah dan fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan penghuninya. Bab ini akan menyajikan data dari beberapa aspek mendasar yang merupakan komponen penyusun sebuah rumah yang berkaitan dengan struktur bangunan perumahan dan fasilitas perumahan tersebut.

Rumah berfungsi pula sebagai sarana pengaman dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengaman bukan berarti menutup diri melainkan tetap harus membuka diri dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen Nomor 9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial



seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material rumah seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah yang berkualitas adalah rumah yang memenuhi syarat tertentu dilihat dari beberapa aspek, seperti luas lantai perkapita, jenis lantai, dinding dan atap yang digunakan. Rumah yang dikategorikan sebagai rumah layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantara persyaratan itu adalah dinding terluas terbuat dari tembok atau kayu, atap dari beton, genteng, ataupun seng ataupun, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Tabel 16. Persentase Rumah Tangga Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Pinrang, 2021-2022

Tahun	Indikator Kualitas Perumahan		
	Lantai Bukan Tanah (%)	Atap Beton, Genteng dan Seng (%)	Dinding terluas Tembok dan Kayu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2021	99,42	96,91	81,18
2022	99,10	94,74	82,09

Sumber: Susenas Maret 2021-2022



Dalam publikasi ini dinding layak huni adalah dinding yang berbahan tembok dan kayu serta tidak lembab dan tidak tembus angin. Data tahun 2022 menunjukkan sebesar 82,09 persen penduduk Kabupaten Pinrang sudah tinggal di dalam rumah dengan dinding yang layak. Meningkat sebesar 0,91 poin persen jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Indikator rumah yang berkualitas lainnya adalah atap. Salah satu fungsi atap adalah untuk melindungi penghuni rumah dari cuaca panas dan hujan. Berdasarkan Tabel 16 diatas, pada tahun 2022 hampir semua rumah tangga di Kabupaten Pinrang tinggal di dalam rumah yang menggunakan atap layak (beton, genteng, seng) sebesar 94,74 persen. Jenis atap genteng yang paling sedikit karena tidak sesuai dengan konstruksi bangunan kayu dan harga yang cukup mahal dibandingkan jenis atap lainnya. Jenis lantai rumah dapat mempengaruhi kondisi kesehatan anggota rumah tangga. Hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Pinrang memiliki jenis lantai terluas bukan tanah yaitu sebanyak 99,10 persen. Lantai bukan tanah terdiri dari keramik, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, dan lantai lainnya. Dengan kata lain masih ada 0,90 persen penduduk yang memiliki tempat tinggal dengan lantai terluas tanah.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal dan layak. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Ketersediaan fasilitas rumah menentukan kenyamanan penghuninya, tingkat kesehatan, dan kemudahan dalam beraktivitas. Fasilitas yang penting agar rumah menjadi nyaman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal antara lain tersedianya air minum bersih, sumber penerangan listrik, serta memiliki kloset sendiri dengan tangki septik/SPAL.



Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi sebagai syarat dari rumah sehat adalah air minum bersih. Sumber air minum yang termasuk kategori air bersih yaitu air kemasan, air ledeng, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus berjarak 10 meter atau lebih dari tempat penampungan tinja/limbah/kotoran terdekat agar dapat dikatakan layak. Pada tahun 2022 sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang telah menggunakan sumber air minum bersih atau sebanyak 75,98 persen rumah tangga mengonsumsi air minum bersih.

Tabel 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pinrang 2021-2022

Fasilitas	2021	2022
Air Minum Bersih*	76,07	75,98
Jamban Sendiri	85,57	86,67
Sumber Penerangan Listrik	99,89	99,84

Ket = *Air Minum Bersih: air kemasan, ledeng, sumber air terlindungi dengan syarat jarak tempat penampungan terdekat > 10m

Sumber: Susenas Maret 2021-2022

Sumber penerangan yang dapat digunakan sebagai fasilitas penerangan diantaranya listrik (PLN dan non PLN), petromak, aladin, pelita, sentir, obor dan lainnya. Listrik merupakan sarana yang cukup penting untuk rumah tangga yaitu sebagai sumber penerangan dan merupakan kebutuhan penting masyarakat. Sumber penerangan di Kabupaten Pinrang terdiri atas 99,84 persen listrik yang terdiri dari listrik PLN dengan meteran, listrik PLN tanpa meteran, dan listrik non PLN. Masih ada 0,16 persen penduduk yang sumber penerangannya bukan listrik. Listrik non PLN umumnya digunakan oleh rumah tangga di daerah yang memiliki akses terbatas seperti beberapa desa di Kecamatan Lembang. Listrik non PLN umumnya bersumber dari swadaya masyarakat atau bantuan lembaga internasional. Sumber tenaga listrik non PLN di Kabupaten Pinrang adalah kincir air. Beberapa wilayah di Kabupaten Pinrang yang tergolong daerah

sulit memang belum terjangkau listrik. Sehingga untuk kehidupannya mereka masih menggunakan penerangan tradisional.

Sistem pembuangan tinja erat kaitannya dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan rumah tangga. Sistem pembuangan tinja sangat mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal rumah tangga tersebut. Kriteria akses terhadap sanitasi layak adalah penggunaan fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) milik sendiri atau bersama, menggunakan kloset dan tempat pembuangan akhir tinjanya berupa tangki septik atau sarana pembuangan air limbah (SPAL).

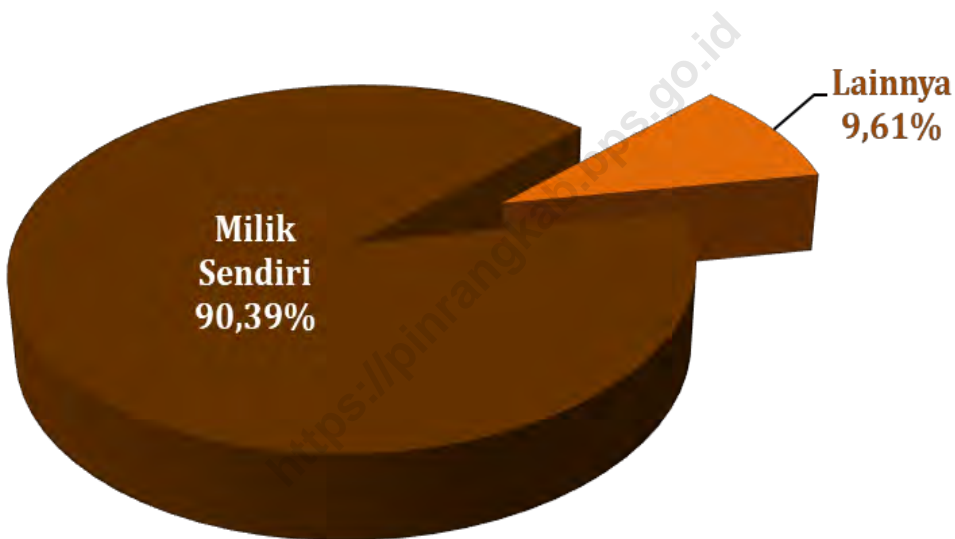
Berdasarkan data Susenas, sebanyak 86,67 persen penduduk Kabupaten Pinrang memiliki fasilitas BAB sendiri, sedangkan sisanya 13,33 persen tidak memiliki fasilitas BAB. Dari 86,67 persen tersebut, mayoritas penduduk menggunakan jenis kloset leher angsa yaitu sebesar 98,61 persen. Kloset leher angsa merupakan kloset leher lubang closet berbentuk lengkungan, dengan demikian akan terisi air, gunanya sebagai sumbat sehingga dapat mencegah bau busuk serta masuknya binatang-binatang kecil. Sisanya yaitu sebesar 1,39 persen menggunakan jenis kloset plengsengan dan kloset cemplung/cubluk. Dengan kata lain penggunaan fasilitas pembuangan air besar di Kabupaten Pinrang Tahun 2022 sebagian besar menggunakan jenis kloset yang sehat.

Tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 yaitu 99,76 persen telah menggunakan tangki septik/IPAL/SPAL dengan dasar semen. Sementara itu, sisanya sebesar 0,24 rumah tangga masih belum memiliki pembuangan akhir tinja yang layak. Pembuangan selain tangki septik/IPAL/SPAL yang digunakan penduduk Kabupaten Pinrang antara lain kolam/sawah/sungai/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lain sebagainya. Dampak serius membuang kotoran yang tidak sehat menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga.



Status Kepemilikan Rumah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat mempengaruhi status kepemilikan tempat tinggal. Status kepemilikan rumah menurut data susenas dikelompokkan menjadi lima macam yaitu milik sendiri, sewa/kontrak, bebas sewa, dinas dan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah tinggal milik sendiri dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



Grafik 11. Persentase Rumah Tangga Kabupaten Pinrang Menurut Status Kepemilikan Rumah Tahun 2022

Sebagian besar rumah tangga Kabupaten Pinrang telah memiliki rumah dengan status milik sendiri yaitu sebanyak 90,39 persen. Namun masih ada 9,61 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan status kepemilikan kontrak/sewa, bebas sewa milik orang lain, rumah dinas, dan lainnya.

fografis kemiskinan...

8

KEMISKINAN

JUMLAH PENDUDUK MISKIN

33.640 jiwa

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang pada Maret 2022 sebanyak 33.640 jiwa

TAHUKAH KAMU?

13 KABUPATEN PINRANG menempati urutan ke-**13** se- Sulawesi Selatan pada Maret 2022 dengan persentase penduduk miskin sebesar **8,79 %**

1,06

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

0,20

Indeks Keparahan Kemiskinan

Ukuran yang dapat memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

Garis Kemiskinan, Maret 2022

Rp.366.808,-/kapita/bulan



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah tersebut. Namun terkadang, pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan menyisakan masalah kemiskinan untuk sebagian masyarakat karena kurangnya kemampuan dalam mengakses baik sumber daya dan faktor produksi yang tersedia maupun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi tersebut.

Masalah kemiskinan merupakan masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Penanggulangan kemiskinan memerlukan langkahlangkah strategis dan sistemik yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan program perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan bagian dari “Nawa Cita” atau Sembilan agenda perubahan yang dicanangkan pemerintah yaitu mengenai peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar warga miskin dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin. Selain itu berbagai program pembangunan juga diluncurkan untuk penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Agar seseorang dapat dikatakan hidup layak, pemenuhan kebutuhan makanan saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu juga dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian



serta aneka barang dan jasa lainnya. Batas kebutuhan minimum untuk makanan ditambah kebutuhan minimum untuk bukan makanan itulah yang disebut dengan Garis Kemiskinan (GK). Singkatnya, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Jika pengeluaran seseorang berada di bawah garis kemiskinan tersebut maka orang tersebut akan dikategorikan miskin.

Menurut Bappenas, miskin adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Definisi tersebut diterjemahkan dalam konsep kemiskinan makro yang dilakukan oleh BPS sebagai penduduk yang pengeluaran perkapita sebulan lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan (GK).

Penanganan kemiskinan perlu didukung oleh data yang berkualitas. Hingga saat ini BPS bertugas untuk mengumpulkan data kemiskinan makro dan mikro. Data kemiskinan makro adalah data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara data kemiskinan mikro adalah data yang menunjukkan nama dan alamat rumah tangga miskin. Data kemiskinan mikro digunakan untuk menentukan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, data kemiskinan makro lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, menentukan target dalam perencanaan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, serta membandingkan kondisi kemiskinan antar waktu dan antar daerah.

Pengukuran kemiskinan makro yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh. Pada publikasi ini akan ditampilkan hasil penghitungan kemiskinan makro yang

dihasilkan dari data konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Tabel 18. Garis Kemiskinan Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2022

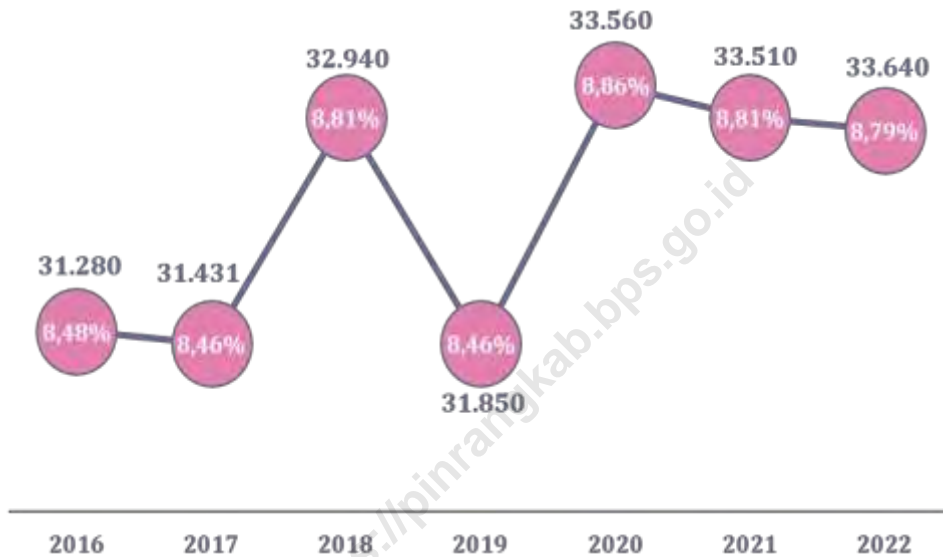
Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)
2016	250.163
2017	256.054
2018	280.746
2019	294.349
2020	336.346
2021	345.892
2022	366.808

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2022

Garis kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2022 adalah Rp 366.808,-. Terlihat dari Tabel 18 garis kemiskinan cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga-harga komoditi makanan maupun non makanan di Kabupaten Pinrang sebagai dampak adanya fluktuasi harga BBM, kenaikan harga komoditi dunia, penurunan nilai tukar yang berdampak pada harga barang impor dan sebagainya.

Kenaikan garis kemiskinan pada umumnya akan diikuti peningkatan persentase penduduk miskin terutama jika kenaikan garis kemiskinan terjadi akibat kenaikan harga yang tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat. Kondisi pada tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan bahwa gejala ekonomi yang terjadi berimbas pada kenaikan kemiskinan karena tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kenaikan garis kemiskinan yang cukup besar yaitu Rp. 14,27 persen pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 menyebabkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang meningkat. Fenomena ini menunjukkan adanya kenaikan harga-harga pada tahun 2020 yang tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan sehingga penduduk yang semula

tergolong hampir miskin pada tahun 2019 menjadi penduduk miskin pada tahun 2020. Garis kemiskinan pada tahun 2021 tetap meningkat namun masih terkontrol yaitu 2,84 persen dibandingkan tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah gencarnya upaya Pemerintah untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19 seperti melonggarkan PPKM dan gerakan vaksinasi gratis bagi seluruh lapisan masyarakat memberikan harapan baru bagi pelaku ekonomi.



Grafik 12. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2022

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang berfluktuasi selama periode 2016 hingga 2022. Selama periode ini, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin yang cukup drastis yaitu pada tahun 2018 dan 2020. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang meningkat sebesar 0,35 poin persen dari 8,46 persen pada tahun 2017 menjadi 8,81 persen pada tahun 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,40 poin persen yaitu dari 8,46 persen atau 31.850 jiwa menjadi 8,86 persen atau 33.560 jiwa. Kemudian turun kembali menjadi 8,81 persen pada tahun 2021. Meningkatnya penduduk miskin pada tahun 2020 salah satunya diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang cukup parah melanda Indonesia termasuk

Pinrang. Hal ini ditandai dengan berlakunya PPKM sejak tahun 2020 yang mengakibatkan beberapa pelaku usaha merumahkan karyawannya dan jam operasional usaha terbatas. Namun kondisi mulai pulih sejak tahun 2021 hingga pada tahun 2022 persentase penduduk miskin turun menjadi 8,79 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 19. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2016-2022

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
2016	1,30	0,36
2017	1,62	0,44
2018	1,16	0,26
2019	1,54	0,40
2020	1,27	0,34
2021	1,77	0,50
2022	1,06	0,20

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2022

Pada periode 2021-2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,77 pada tahun 2021 menjadi 1,06 pada tahun 2022. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, pada tahun 2022 sebesar 0,20, lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,50. Penurunan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan yang terjadi pada Periode Maret 2021-Maret 2022 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan,



dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kata lain, rata-rata pendapatan dan ketimpangan kemiskinan pada Maret 2022 lebih baik dibandingkan kondisi Maret 2021.

<https://pinrangkab.bps.go.id>



9

SOSIAL LAINNYA

AKSES PADA TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI



Selama 3 bulan terakhir, lebih banyak LAKI-LAKI memiliki, menggunakan hp/komputer/pc dan mengakses internet dibandingkan PEREMPUAN

AKSES INTERNET
68,21%

93,27% PENGGUNAAN HP/LAPTOP/PC,DLL

Penduduk Pinrang usia 5 tahun ke atas yang menggunakan hp/komputer/pc (93,27%) dan mengakses internet (68,21%) selama tiga bulan terakhir

Selama tahun 2021, 1 dari 100 penduduk Pinrang mengaku pernah menjadi KORBAN KEJAHATAN



PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL & JAMINAN SOSIAL

18,36%

Rumah Tangga yang Menerima RASKIN/RASTRA/BPNT

9,24%

Rumah Tangga yang Memiliki ASURANSI/PESANGON PHK



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Aspek sosial, seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Tingkat keamanan wilayah dapat menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan sosial wilayah tersebut. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi indikasi semakin nyamannya wilayah tersebut, yang pada ujungnya berafiliasi pada peningkatan kesejahteraan sosial pada wilayah tersebut. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

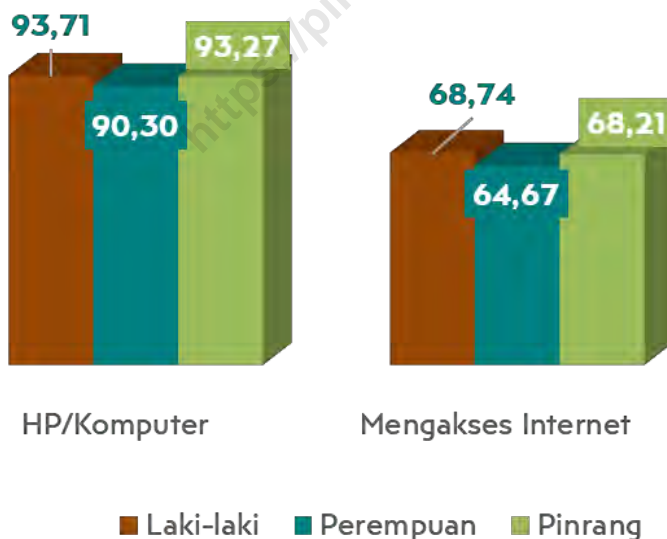
Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada



di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunaannya. Begitu pula dengan penggunaan komputer rumah ataupun laptop pada rumah tangga mulai tergeser keberadaannya dengan semakin maraknya gawai yang lebih praktis mobilitasnya, seperti smartphone.

Internet sebagai salah satu jendela ilmu pengetahuan, merupakan teknologi yang berkembang sangat pesat. Berbagai sektor ekonomi pun telah banyak memanfaatkan teknologi tersebut. Penggunaan internet pun semakin memasyarakat. Penting bagi masyarakat untuk melek internet selain melek huruf. Kemampuan akses internet juga menunjukkan kemajuan pola pikir masyarakat. Banyak hal positif yang bisa dilakukan dengan teknologi satu ini. Pengetahuan, penghasilan, informasi lainnya bisa didapat melalui internet. Perkembangan teknologi dan informasi bergerak sangat cepat, bagi masyarakat yang mengikuti, secara tidak langsung ikut berkembang dalam hal pengetahuan, kemampuan, dan kreatifitas. Namun efek negatif internet pun tetap harus diwaspadai. Banyak hal seperti norma sosial serta budaya yang telah tergerus oleh perkembangan internet, disamping itu secara individu, juga turut mempengaruhi aspek fisik dan psikologis masyarakat.



Grafik 13. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler/Komputer dan Pernah Mengakses Internet di Kabupaten Pinrang, 2022

Dari Grafik 13 dapat diketahui bahwa persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang memiliki dan menguasai telepon seluler/komputer sebesar 93,27 persen. Penduduk laki-laki lebih banyak memiliki dan menguasai telepon seluler/komputer dibandingkan perempuan. Sebanyak 95,71 persen penduduk laki-laki sudah memiliki dan menguasai telepon seluler/komputer dan hanya sebesar 90,30 persen dari penduduk perempuan memiliki dan menguasai telepon seluler/komputer. Sedangkan penduduk usia 5 tahun keatas yang mengakses internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, dan Whatsapp) selama 3 bulan terakhir sebesar 68,21 persen. Artinya lebih dari separuh penduduk usia 5 tahun ke Atas pernah mengakses internet selama 3 bulan terakhir. Menariknya, penduduk laki-laki yang mengakses internet lebih banyak apabila dibandingkan dengan perempuan.

Tingkat Keamanan

Selain teknologi dan informasi, aspek keamanan di suatu wilayah turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Penduduk yang termasuk dalam korban kejahatan yang dicakup dalam Susenas ini adalah semua bentuk korban kejahatan seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, atau lainnya kecuali kejahatan kasus pembunuhan karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota rumah tangga lagi.

Sepanjang tahun 2021 (1 Januari – 31 Desember 2021), sebanyak 0,34 persen penduduk Kabupaten Pinrang mengaku pernah menjadi korban kejahatan selama satu tahun terakhir. Artinya setiap 100 penduduk Kabupaten Pinrang, setidaknya ada 1 orang yang menjadi korban kejahatan. Bila kita kalikan dengan total jumlah penduduk, maka sekitar 139 ribu penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 pernah menjadi korban kejahatan selama setahun terakhir. Selain itu, berdasarkan hasil SUSENAS Maret 2022, penduduk laki-laki lebih banyak mengaku pernah menjadi korban kejahatan dibandingkan perempuan selama setahun terakhir.



Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis

Selain tingkat keamanan wilayah, bantuan kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan.

Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja. Beberapa contoh program pemberian kredit usaha dari pemerintah diantaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan maupun program lain selain KUR. Selain bank, koperasi juga memberikan layanan kredit usaha kepada masyarakat.

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakatnya. Bantuan pemerintah dalam kredit usaha ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan akhirnya kesejahteraannya meningkat. Sasaran terhadap UMKM pun diharapkan bisa lebih optimal guna menstimulus perekonomian. Terutama kredit untuk UMKM sektor Pertanian diharapkan dapat lebih optimal, mengingat banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak demi tercapainya kesejahteraan sosial, perlu diperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi-kondisi sosial, diantaranya kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran dan kondisi terkait lainnya. Program pelayanan ini tentunya lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu. Adanya jaminan sosial merupakan wujud pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Berdasarkan Susenas Maret 2022, penerima jaminan sosial berupa jaminan hari tua sebesar 5,61 persen sedangkan asuransi/pesangon PHK sebanyak 9,24 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, persentase rumah tangga penerima jaminan sosial baik berupa jaminan hari tua

maupun asuransi/Pesangon PHK semakin menurun. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pinrang untuk terus berupaya meningkatkan sasaran penerima jaminan sosial. Semakin besar jumlah penerima jaminan sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya yang kurang mampu karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.

Tabel 20. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Tahun 2022

Jenis Jaminan		Persentase
Perlindungan Sosial	Raskin/Rastra/BPNT	18,36
	KKS	17,65
	PKH	7,81
Jaminan Sosial	Jaminan Hari Tua	5,61
	Asuransi/Pesangon PHK	9,24

Sumber : Susenas Maret 2022

Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sosial lainnya, utamanya yang tidak tersentuh oleh jaminan sosial adalah pengadaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Data Susenas Maret 2022 menunjukkan penerima KPS/KKS pada tahun 2022 sekitar 17,65 persen. Fungsi KKS adalah sebagai penanda bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial maupun bantuan pangan non tunai. Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat terutama masyarakat miskin, sehingga tercipta kesejahteraan yang merata.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sektor pangan, pemerintah memberlakukan program beras miskin atau beras kesejahteraan (raskin/rastra) dan juga bantuan pangan non tunai (BPNT), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2002. Harga raskin/rastra tergolong sangat murah jika dibandingkan harga beras normal, dengan rata-rata harga tebus per kilogram hanya sekitar Rp. 1.600. Hingga saat ini persentase rumah tangga yang telah mendapat manfaat program raskin/rastra/BPNT



mencapai 18,36 persen. Sentuhan pemerintah terhadap kebutuhan pangan melalui raskin/rastra/BPNT merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap polemik kemiskinan, yang tujuannya untuk penyetaraan kesejahteraan masyarakat.

<https://pinrangkab.bps.go.id>



10

DAFTAR PUSTAKA



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, UNFPA. 2015. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2020. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2022. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2022. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Sulawesi Selatan Per Kabupaten/Kota. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. Statistik Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar.



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

11

LAMPIRAN RSE



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

LAMPIRAN RSE

Tabel 1. RSE Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin, 2022

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan
(1)	(2)
Laki-laki	12,73
Perempuan	10,25
Kabupaten Pinrang	10,03

Tabel 2 RSE Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Jenis Kelamin, 2022

Jenis Kelamin	Persentase Baduta Pernah diberi ASI	Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	3,67	15,89
Perempuan	0,00	8,10
Kabupaten Pinrang	1,60	7,88



Tabel 3 RSE Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Jenis Kelamin, 2022

Jenis Kelamin	Memiliki Kartu Imunisasi*	Mendapat Imunisasi Lengkap
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	0,00	6,50
Perempuan	2,55	6,24
Kabupaten Pinrang	1,22	4,61

*) Memiliki Kartu Imunisasi baik yang *dapat ditunjukkan* maupun *tidak dapat ditunjukkan*

Tabel 4 RSE Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi, 2022

Jenis Kelamin	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/ MMR	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	1,91	3,01	2,42	5,35	1,37
Perempuan	2,92	3,10	3,14	5,95	2,84
Kabupaten Pinrang	1,89	2,31	2,24	4,00	1,70

Tabel 5 RSE Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, 2022

Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan	Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
(1)	(2)	(3)
Kabupaten Pinrang	6,95	0,99

Tabel 6 RSE Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2022

Jenis Kelamin	Huruf Latin	Huruf Lainnya
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	0,77	4,22
Perempuan	1,00	3,91
Kabupaten Pinrang	0,69	3,70

Tabel 7 RSE Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2022

Jenis Kelamin	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	9,93	6,91	7,88	6,11
Perempuan	9,66	6,60	6,93	5,62
Kabupaten Pinrang	8,22	5,52	5,58	4,87

Tabel 8 RSE Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2022

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7 – 12 tahun	0,00	0,73	0,37
13 – 15 tahun	7,41	0,27	4,14
16 – 18 tahun	6,75	9,67	5,62
APM			
SD	0,00	0,73	0,37
SMP	10,76	8,12	7,01
SMA	12,17	10,39	7,75

Tabel 9 RSE Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2022

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Padi-padian	2,87	2,85	4,80	2,02
2. Umbi-umbian	14,32	14,26	15,98	8,62
3. Ikan/udang/ cumi/kerang	3,37	3,56	6,41	3,35
4. Daging	22,51	16,05	14,75	10,44
5. Telur dan susu	6,97	9,21	11,53	5,90
6. Sayur-sayuran	4,47	3,42	7,22	3,42
7. Kacang-kacangan	6,38	7,31	7,00	4,78
8. Buah-buahan	7,16	5,56	10,65	5,90
9. Minyak dan kelapa	4,61	4,47	6,82	3,48
10. Bahan minuman	7,05	4,77	6,58	3,67
11. Bumbu-bumbuan	5,85	4,60	8,13	3,97
12. Konsumsi lainnya	5,25	4,99	6,60	3,62
13. Makanan dan minuman jadi	4,26	4,06	6,38	4,41
14. Rokok dan tembakau	11,05	8,65	11,81	7,23
Jumlah Makanan	2,10	2,18	2,40	2,75
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	3,27	4,02	3,96	3,97
16. Aneka barang dan jasa	4,03	5,68	6,64	4,82
17. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	4,04	6,90	9,77	6,74
18. Barang tahan lama	27,88	19,97	27,53	26,42
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	4,66	5,59	10,22	5,96
20. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	51,29	25,24	26,80	20,75
Jumlah Bukan Makanan	3,11	3,31	6,91	5,69
Jumlah Pengeluaran Kabupaten Pinrang	1,86	1,88	4,00	3,84

Tabel 10 RSE Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kcal) dan Konsumsi Protein (Gram) per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Kcal), 2022

Kelompok Komoditas Makanan (1)	Total Konsumsi	
	Kalori (2)	Protein (3)
1. Padi-padian	1,87	1,87
2. Umbi-umbian	10,75	9,66
3. Ikan/udang/ cumi/kerang	2,81	2,78
4. Daging	9,98	9,87
5. Telur dan susu	4,78	3,93
6. Sayur-sayuran	3,30	3,75
7. Kacang-kacangan	4,31	4,25
8. Buah-buahan	4,73	3,91
9. Minyak dan kelapa	3,27	8,53
10. Bahan minuman	3,72	6,31
11. Bumbu-bumbuan	5,60	5,39
12. Konsumsi lainnya	3,36	3,35
13. Makanan dan minuman jadi	2,78	5,28
14. Rokok dan tembakau	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Kabupaten Pinrang	1,35	1,42

<http://pinrangkab.go.id>

Tabel 11 RSE Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2022

Fasilitas Perumahan	Nilai RSE
(1)	(2)
Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	
Milik Sendiri	1,62
Bukan Milik Sendiri*	15,28
Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	
Sendiri	1,85
Lainnya**	12,04
Jenis Kloset	
Leher Angsa	0,57
Lainnya	40,69
Tempat Pembuangan Akhir Tinja	
Tangki septik/ IPAL/ SPAL	0,14
Lainnya	58,51
Sumber Air Utama Untuk Minum/Mandi/Cuci/dll	
Air Minum Bersih	2,68

*) Termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat, dll

**) Lainnya termasuk fasilitas bersama, MCK Umum, dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang air besar.



Tabel 12 RSE Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2022

Jenis Kelamin	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	0,96	2,46
Perempuan	2,51	4,90
Kabupaten Pinrang	0,90	2,24

Tabel 13 RSE Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2022

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
(1)	(2)
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	10,62
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)*	11,00
Program Keluarga Harapan (PKH)	16,04

*) Menerima KPS/KKS baik yang **tidak dapat menunjukkan kartu** maupun **dapat menunjukkan kartu**

Tabel 14 RSE Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Jaminan Sosial, 2022

Jenis Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Jaminan pensiun/hari tua*	19,94
Asuransi/PHK**	14,69

* Jaminan pensiun/hari tua terdiri dari: Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua

** Asuransi/PHK terdiri dari: Asuransi kematian, Jaminan kecelakaan kerja, & Pesangon PHK

<https://pinrangkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No 18, Pinrang, 91211

Telp/Fax : (0421) 921021

Email : bps7315@bps.go.id

Homepage : pinrangkab.bps.go.id

ISSN 2797-2763



9

772797

276005